



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Soal DD,PJ Kades Dilaporkan Ke Pemkab**

**KARANG TINGGI, BE** - Penjabat (Pj) Kades Taba Tarunjam, Muin diduga dan dinilai perangkat desa setempat menyalahi aturan penggunaan dana desa (DD) bantuan dari Pemerintah Pusat. Pj Kades diduga melibatkan pihak ketiga alias orang luar desa agar pengerjaan pembangunan rabat beton jalan usaha tani (JUT) sepanjang 800 meter cepat selesai. Semestinya, pengerjaan pembangunan fisik dilakukan dengan menggunakan sistem padat karya atau swakelola masyarakat. Artinya, pengerjaan infrastruktur dikerjakan langsung oleh masyarakat setempat.

Ulah Pj kades itu telah dilaporkan ke Pemkab Bengkulu Tengah, dalam hal ini pada Asisten III.

"Apa yang dilakukan Pj Kades telah menyalahi aturan. Pengerjaan pembangunan dari dana desa diborongkan kepada pihak ketiga. Maka dari itu, kami dari TPKD menolak bertanggung jawab dan menekan SPj," ungkap Kasi Pembangunan Desa Taba Tarunjam, Feri Agustian, kemarin (29/12) kepada BE.

Ditambahkannya, Pj Kades juga terkesan tertutup dan memonopoli kegiatan pembangunan. Hal ini terlihat dari sikap Pj Kades yang dinilai tidak transparan dalam mengelola keuangan. Tim pelaksana kegiatan desa (TPKD) yang semestinya sebagai ujung tombak pengerjaan pembangunan sama sekali tidak dilibatkan.

"RAB sengaja disembunyikan dan tak diperlihatkan kepada TPKD. Ini ada apa? Hanya sebagian kecil saja warga desa kami yang dilibatkan, pembayaran upah pun dilakukan di luar desa," ungkap Feri.

Menyikapi hal itu, kata Feri, pihaknya sudah menunjuk kuasa hukum agar dapat mendesak Pemda Benteng mengambil sikap tegas terhadap Pj Kades.

Pantauan BE, sejumlah perangkat Desa Taba Tarunjam didampingi kuasa hukumnya, Hartanto SHI mendatangi kantor Bupati Benteng untuk mencari kejelasan terkait aturan penggunaan DD serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pj Kades.

"Kami sudah melakukan mediasi dengan Asisten III dan Kabag Pemerintahan. Jika nanti ada indikasi hukum pidana, kami akan laporkan hal ini ke APH," tegas Hartanto.

Sementara itu, Pj Kades Taba Tarunjam, Muin dengan tegas membantah kabar miring tentang dirinya. Muin mengklaim apa yang dikerjakan telah sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

"Pembangunan dikerjakan oleh masyarakat dan pembayaran upah dilakukan di rumah Sekdes. Semuanya dikerjakan sesuai prosedur," tandas Muin. (135)